



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 900.1.7/1/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar, dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menunjuk aparatur sipil negara yang tercantum nama, pangkat, dan jabatannya dalam kolom 3 sebagai Bendahara Pengeluaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP Uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang (GU), SPP Tambah Uang (TU) dan SPP Langsung (LS);
 - b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU);
 - c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU) yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif ke PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) secara periodik;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melaksanakan tugas Bendahara Pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Khusus Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan belanja non gaji dan Pembiayaan Daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	PARAF	TGL
Sekretaris Daerah	A	
Asisten	MA	
Ka. BPKAD		
Sek. BPKAD	MA	
Kasubag.		

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 02 Januari 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	PA
KEPALA BAGIAN HUKUM	A
JF. Pengarah Hukum Mada	
PELAKSANA	A

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR : 900.1.7/1/TAHUN 2026

TANGGAL : 02 JANUARI 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KOTA MAKASSARPENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	Nama : Fika Fitranika M, S.S., M.M NIP : 19860609 201503 2 004 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
2	DINAS KESEHATAN	Nama : Fitriani, SE,MM NIP : 19870527 201101 2 024 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
3	DINAS PEKERJAAN UMUM	Nama : Rabawati, S.T., M.T NIP : 19810507 200902 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
4	DINAS PENATAAN RUANG	Nama : Diana, S.Sos., MM NIP : 19790810 200701 2 021 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Nama : Astri Surya Dewi, S.Si NIP : 19830323 200901 2 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Nama : Hardiana, S.Sos NIP : 19811216 201407 2 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Nama : Ahmad Tahir NIP : 19861117 200901 1 002 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nama : Mustam,S.E NIP : 19681227 201407 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
9	DINAS SOSIAL	Nama : Muhammad Nur Khidfi Syair, S.T NIP : 19930325 201903 1 009 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
10	DINAS KETENAGAKERJAAN	Nama : Handayani, A. S.E NIP : 19830502 201001 2 034 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nama : Fadliah Novrianty, S.E NIP : 19841110 201001 2 034 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	Nama : Risnawati Maruru, SP NIP : 19840508 201903 2 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
13	DINAS PERTANAHAN	Nama : Reni Santuni Gavindasani, S.IKom NIP : 19820626 200604 2 015 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Nama : Ira Puspita Usmany, S.E NIP : 19770427 201001 2 014 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Nama : Munawir Amir NIP : 19840503 200701 1 005 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda (II/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Nama : Muslihul,SKM NIP : 19820531 200901 1 006 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
17	DINAS PERHUBUNGAN	Nama : Hasanuddin, S.Ap NIP : 19820206 201001 1 012 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nama : Sitti Arifah, ST NIP : 19820826 201001 2 032 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
19	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Nama : Nur Asia, SE NIP : 19720705 201212 2 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Nama : Muhammad. Ardiansyah Dalie NIP : 19840522 201101 1 014 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Nama : Ipadiyanti, S.E. NIP : 19820120 201101 2 010 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
22	DINAS KEBUDAYAAN	Nama : Irma Yanti NIP : 19860815 201001 2 018 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
23	DINAS PERPUSTAKAAN	Nama : Tuty Fatmawanty, A.Md NIP : 19820602 201504 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
24	DINAS KEARSIPAN	Nama : Sitti Hadijah NIP : 19710228 201407 2 002 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
25	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN	Nama : Hasra, S.Pi NIP : 19740420 200604 2 006 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
26	DINAS PARIWISATA	Nama : Dian Kurniati Mailite,SS NIP : 19840119 200901 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Nama : A.Yuniar S, S.E.,M.M NIP : 19770620 201001 2 025 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
28	SEKRETARIAT DAERAH	Nama : Muhammad Fuad Saadillah, S.Tr.Ip NIP : 19980405 202108 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
29	SEKRETARIAT DPRD	Nama : Juniartien A.Md NIP : 19750608 199803 2 009 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
30	BAPPEDA	Nama : Ari Pahlawan Sofyan, S.STP NIP : 19960608 201808 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Nama : Irwanto D Kasad, S.E NIP : 19820504 200801 1 004 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Nama : Murniati, S.E NIP : 19731002 200701 2 008 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Nama : Zulkifli NIP : 19850913 200502 1 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
34	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Nama : Firnawati, S.E NIP : 19770826 201212 2 001 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
35	INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR	Nama : Rian Pratama Putra, S.E NIP : 19910417 201903 1 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nama : Sunarto Randa, S.Pd., M Han NIP : 19750328 200701 1 010 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
37	KECAMATAN BIRINGKANAYA	Nama : Sahariah Landareka, S.Sos NIP : 19741223 200801 2 005 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
38	KECAMATAN BONTOTALA	Nama : Muhsinah, S.E NIP : 19740824 200801 2 008 Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
39	KECAMATAN MAKASSAR	Nama : Wirdaningsih, S.E NIP : 19760305 201411 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
40	KECAMATAN MAMAJANG	Nama : I Made Sujana Yasa, S.E NIP : 19740706 201001 1 011 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
41	KECAMATAN MANGGALA	Nama : Setiyo Budi Sukarjo NIP : 19700908 201407 1 005 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3
42	KECAMATAN MARISO	Nama : Merlyin Lestari, S.E NIP : 19870515 201001 2 018 Pangkat/Gol. : Penata (III/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
43	KECAMATAN PANAKKUKANG	Nama : Nasriah , S.E NIP : 19740207 200801 2 012 Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
44	KECAMATAN RAPPOCINI	Nama : Ariyanto Yusuf NIP : 19810320 201001 1 001 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk. I (II/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
45	KECAMATAN TALLO	Nama : Ariyanto Ardi, S.E NIP : 19910810 201104 1 001 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
46	KECAMATAN TAMALANREA	Nama : Tasriwati NIP : 19740817 201408 2 001 Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
47	KECAMATAN TAMALATE	Nama : Atika Adam, S.E NIP : 19801226 201410 2 003 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
48	KECAMATAN UJUNG PANDANG	Nama : ST. Asraeni, SE, M.Si NIP : 19820621 201410 2 002 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
49	KECAMATAN UJUNG TANAH	Nama : Edi Azis NIP : 19830208 201001 1 017 Pangkat/Gol. : Juru Tk.I (I/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
50	KECAMATAN WAJO	Nama : Zulham NIP : 19790710 201001 1 032 Pangkat/Gol. : Pengatur Tk.I (II/d) Jabatan : Bendahara Pengeluaran
51	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG	Nama : Suharfah Karaseng, SE NIP : 19831004 201001 1 019 Pangkat/Gol. : Pengatur Muda Tk.I, (II/b) Jabatan : Bendahara Pengeluaran

WALI KOTA MAKASSAR

MUNAURI ARIFUDDIN